



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INTERVENSI PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT. ADARO INDONESIA DALAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN BALANGAN

Mami Susanti ¹, Syamsul Arifin ², Izaak Zoelkarnain ³, Adi Nugroho ⁴,
Meitria Syahadatina Noor ⁵

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan, mamisusanti.aan@gmail.com

^{2,3,4} Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Lambung Mangkurat

dr.syamsularifin@ulm.ac.id, izaak.akbar@ulm.ac.id, adinugroho@ulm.ac.id, drmeitria@ulm.ac.id

Abstrak

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK). Melalui program CSR dapat menjadi salah satu upaya pendukung dari pihak swasta untuk mengejar target percepatan penurunan prevalensi stunting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan intervensi program CSR PT. Adaro Indonesia dalam penurunan stunting di Kabupaten Balangan Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan pengembangan teori Edwar III dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian ini berjumlah 15 orang. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu; reduksi, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian terdiri dari; 1) Bentuk implementasi tercantum dalam Term Sheet Kegiatan; 2) Implementasi dari aspek standar dan tujuan sudah sesuai dan berjalan optimal; 3) Implementasi program dari aspek karakteristik organisasi masih ditemukan ketidak optimalan dalam menjalankan upaya percepatan penurunan stunting; 4) Implementasi program dari aspek sumber daya sudah sesuai dan berjalan optimal; 5) Implementasi program CSR PT. Adaro Indonesia dalam penurunan stunting di Kabupaten Balangan dari aspek komunikasi masih ditemukan kendala atau hambatan; 6) Implementasi program dari aspek sikap pelaksana telah sesuai dan berjalan optimal; 7) Implementasi program dari aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah sesuai dan berjalan optimal.

Kata Kunci: *stunting, CSR, implementasi.*

Abstract

Stunting is a condition of growth failure in children under five years of age (toddlers) due to chronic malnutrition and recurrent infections, especially in the First 1,000 Days of Birth (HPK). Through the CSR program, it can be one of the supporting efforts of the private sector to pursue the target of accelerating the reduction in the prevalence of stunting. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the CSR program intervention policy of PT. Adaro Indonesia in reducing stunting in Balangan Regency in 2023. This study uses a qualitative approach through Van Meter and Van Horn's policy implementation theory with the development of Edward III's theory with a case study design. The informants for this study numbered 15 people. The study was conducted through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used by the author is the Miles and Huberman model, namely; reduction, data analysis, and drawing conclusions. The results of the study consist of; 1) The form of implementation is listed in the Activity Term Sheet; 2) Implementation from the aspects of standards and objectives is appropriate and running optimally; 3) Implementation of the program from the aspect of organizational characteristics is still found to be suboptimal in carrying out efforts to accelerate stunting reduction; 4) Implementation of the program from the aspect of resources is appropriate and running optimally; 5) Implementation of the CSR program of PT. Adaro Indonesia in reducing stunting in Balangan Regency from the aspect of communication still found obstacles or barriers; 6) Implementation of the program from the aspect of the implementer's attitude has been appropriate and running optimally; 7) Implementation of the program from the aspect of the social, economic and political environment has been appropriate and running optimally.

Keywords: *stunting, CSR, implementation.*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

✉ Corresponding author :

Address : Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : mamisusanti.aan@gmail.com

Phone : 0812-5834-3364

PENDAHULUAN

Berdasarkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 stunting sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada dibawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya (Sekretariat Wakil Presiden RI, 2019).

Angka stunting Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan pada tahun 2020 sebesar 33,08% 2021 sebesar 30% menjadi 24,6% pada tahun 2022. Target penurunan prevalensi stunting untuk Provinsi Kalimantan Selatan sama dengan target RPJMN yaitu angka stunting di bawah 20%, yang tercantum pada RENSTRA 2022-2024 untuk target penurunan prevalensi stunting sebesar 16% pada tahun 2023 dan 14% pada tahun 2024 (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2023).

Penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia salah satunya dengan strategi lima pilar yaitu komitmen keberlanjutan dari para pemimpin, peningkatan literasi masyarakat, konvergensi dan keterpaduan lintas sektor, pemenuhan gizi yang tepat dan terakhir penguatan system pemantauan dan evaluasi. Sesuai Startegi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 ada 20 indikator dalam program penurunan stunting dimana 16 diantaranya berada pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitive (Makripuddin, L., Roswandi, D. A., 2021).

Beberapa isu dan permasalahan stunting berdasarkan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) Kabupaten Balangan meliputi beberapa diantaranya ibu hamil dan balita risiko tinggi, tingginya perkawinan usia dini, cakupan desa *Open Defecation Free* (ODF) yang masih rendah, serta kurang meratanya pemenuhan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (Bappedalitbang Kabupaten Balangan, 2023).

Percepatan penurunan stunting adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integrative dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan desa. Perlu adanya kolaborasi dari semua sektor (pentahelix) dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Keterlibatan pihak swasta ini diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistic, integrative, dan kualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara kementerian/ lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Melalui program CSR dapat menjadi salah satu upaya pendukung dari pihak swasta untuk mengejar target percepatan penurunan prevalensi stunting (Percepatan Penurunan Stunting, 2021).

Dalam penanggulangan stunting, banyak program-program yang telah di laksanakan oleh instansi terkait, namun tidak semua program tersebut

dapat dijalankan secara maksimal karena keterbatasan pendanaan kegiatan. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabuapten Balangan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di lingkup wilayahnya dalam bentuk pemanfaatan CSR. Ada beberapa program CSR dari perusahaan yang ada diwilayah kerja Pemerintah kabupaten Balangan, namun hanya program CSR PT. Adaro Indonesia yang menangani permasalahan program prioritas stunting sejak tahun 2020.

Keterkaitan antara upaya pemerintah dan CSR dalam penanganan stunting terletak pada sinergi dan kolaborasi antara keduanya. Pemerintah dapat menyediakan kerangka kerja regulasi, sumber daya, dan bimbingan kebijakan, sementara perusahaan melalui CSR dapat memberikan dukungan finansial, sumber daya manusia, dan keahlian operasional untuk melaksanakan program-program pencegahan stunting dengan lebih efektif. Pola kerja sama ini perlu dilakukan analisis terkait implementasi kebijakn yang dijalankan oleh CSR dan pemrintah daerah, agar nantinya dapat memperbaiki atau memperkuat kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan efektif. Kerja sama antara pemerintah dan pihak CSR dalam hal ini juga dapat menciptakan efek jangka panjang yang lebih besar, dengan memastikan berkelanjutan dan skalabilitas program-program pencegahan stunting dari berbagai sektor serta membangun kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara mandiri.

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah yang terdapat operasional perusahaan pertambangan sebagai salah satu stakeholder bagi pemerintah daerah, yaitu PT. Adaro Indonesia. Bagi perusahaan dalam menjalankan implementasi program CSR khususnya intervensi penurunan stunting di Kabupaten Balangan sangat diperlukan sebagai bentuk sinergitas anatra perusahaan dan pemerintah daerah, dalam hal ini perusahaan akan mendapatkan kepercayaan serta apresiasi dari pemangku kepentingan yang dalam hal ini Kabupaten Balangan. Hal ini juga menunjukan bahwa hubungan baik antara PT. Adaro Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Balangan dapat mempertahankan kolaborasi atau hubungan kerjasama dengan baik. Selaras dengan Iswiyati Rahayu (2014) dalam penelitiannya menyebutkan perusahaan dalam pelaksanaan program CSR berfokus pada tiga hal, yaitu laba, lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaan program CSR dalam perusahaan berdampak membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya. Tidak hanya mencari keuntungan atau laba namun pihak perusahaan juga berkontribusi melalui pengembangan dan kualitas kehidupan masyarakat. Dan pihak pemerintah sebagai pihak pemberian otoritas, perlu melakukan intervensi melalui kebijakan-kebijakan dalam pencapaian kinerja pembangunan pemerintah di wilayahnya (Rahayu, 2014).

Menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip dari Peta Teori Ilmu Kesehatan Masyarakat menyebutkan 6 variabel yang dapat memepengaruhi suatu impelentasi kebijakan, diantaranya yaitu karakteristik organisasi, standar kebijakan dan sasaran, sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana,

serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Variable-variabel bebas tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi suatu kebijakan untuk mencapai tujuannya (Arifin, S., Mutiasari, D., & Putra, 2020; Van Meter DS, 1975).

Hasil penelitian Dian Rosa, et all (2022) bahwa percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting tidak berhasil dalam menurunkan kasus stunting di Kabupaten Bandung walaupun kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting telah dilaksanakan sesuai dengan langkah konvergensi, baik intervensi gizi sensitif maupun spesifik dikarenakan pandemi Covid-19 (Sunaryo et al., 2022). Nurva dan Maharani (2023) menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Brebes secara keseluruhan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, dari segi pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saling bekerja sama, namun banyak hambatan yang dialami membuat kebijakan ini belum mencapai tujuan, dimana hambatan dari lintas sektor masih belum maksimal dalam upaya koordinasi dan komunikasi (Nurva & Maharani, 2023).

Nova Pramstuti dan kawannya (2022) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa program percepatan penanggulangan stunting harus ditangani secara multisektor dan multipihak. Semua wilayah di DIY hingga level kelurahan telah melaksanakan “rembug stunting”. Kegiatan di masing-masing OPD diarahkan untuk stunting. Kendala dalam percepatan penurunan stunting meliputi sinkronisasi waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah, belum terimplementasinya standar alokasi anggaran percepatan penurunan stunting yang signifikan, serta belum optimalnya manajemen akurasi dan kualitas data dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rokan Hulu (2023) (Pramestuti, Nova., Iskandar, Slamet., Rubaya, Kharmayana, 2022; Syamsuadi et al., 2023).

Iswiyanti Rahayu (2014) juga menyebutkan bahwa kegiatan CSR tidak berorientasi pada pada hasil semata, tetapi lebih ditekankan terhadap pemberdayaan komunitas masyarakat lokal. Anggaran CSR dialokasikan untuk pengembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosio-kultural, anggaran operasional dan proyek khusus (Rahayu, 2014).

Putri Herista dan Sri Dewi Setiawati (2023) dalam penelitiannya Implementasi CSR program Health & Nutrition di *Site* Rantau menyebutkan bukan suatu hal yang mudah bagi perusahaan bisa terus bersinergi dengan para stakeholder dengan waktu belasan tahun, terjaminnya keberlangsungan usaha perusahaan bukan hanya menjadi andalan oleh kondisi keuangan. Tetapi dibutuhkan rasa dasar betapa penting kondisi sosial dan lingkungan sehingga perlu diperhatikan, khususnya di wilayah sekitar yang mana berlangsungnya operasional perusahaan, dengan begitu akan tercipta hubungan dari masyarakat dan pihak perusahaan secara harmonis. Melihat dengan adanya masalah yang menjadi prioritas bagi perusahaan yaitu stunting menjadi peluang melaksanakan CSR program Health

& Nutrition tanpa adanya paksaan bagi perusahaan (Herista, Putri, Setiawati, 2023).

Target prevalensi stunting di Kabupaten Balangan berdasarkan Revisi Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Indikator Kinerja Utama berdasarkan data hasil Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) untuk tahun 2019 sebesar 26,70%, tahun 2020 sebesar 25,78%, tahun 2021 sebesar 17,91%, tahun 2022 sebesar 14,91% dan tahun 2023 sebesar 14,61%. Data EPPGBM ini merupakan data hasil pengukuran seluruh balita dan pelaporan yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas yang dientry setiap bulannya. Data prevalensi stunting tersebut setiap tahunnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun masih di atas target yang diharapkan. Penurunan angka prevalensi stunting Kabupaten Balangan masih diatas nilai nasional yang disebutkan sebelumnya, yaitu dari target kurang dari 14% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian ini berjumlah 15 orang. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu; reduksi, analisa data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai pengamat penuh dan status peneliti jelas diketahui oleh informan. Peneliti menggunakan instrumen pendukung lainnya berupa pedoman wawancara (*interview guide*) berisi daftar pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan dapat berkembang dan menggali informasi sebanyak dan sedalam mungkin.

Informan terdiri dari Staff CSR PT. Adaro Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan kader stunting serta sasaran stunting. Penelitian dilakukan di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian dilakukan pada bulan juni-juli 2024. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

o Bentuk Implementasi Intervensi Program CSR PT. Adaro Indonesia dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Balangan

Berdasarkan hasil wawancara dan telusur dokumen yang telah dilakukan maka untuk implementasi intervensi yang tertuang dalam TSK program percepatan penurunan stunting PT. Adaro Indonesia berupa intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik yang dilaksanakan berupa: pemberian bantuan stimulan PMT selama 6 bulan berupa susu dan telur untuk sasaran balita stunting dan susu untuk sasaran ibu hamil KEK, pemberian vitamin untuk balita stunting dan pemantauan kesehatan bagi balita stunting. Sedangkan intervensi

sensitif yang dilakukan meliputi: pemberian bibit sayuran beserta polibek, pendampingan kepesertaan BPJS bagi sasaran dan juga pembangunan sarana sanitasi (jamban sehat).

Bentuk-bentuk intervensi tersebut berjalan baik dan optimal dimana kegiatan intervensi tersebut sesuai dengan Strategi Percepatan Pencegahan Stunting Priode 2018-2024. Upaya intervensi spesifik dan sensitif ini menyasar penyebab langsung dan tidak langsung dengan pendekatan menyeluruh pada sasaran langsung, lingkungan sekitar maupun lingkup yang lebih luas lagi.

Didalam stranas tersebut intervensi pemberian bantuan stimulant PMT untuk sasaran balita stunting dan ibu hamil KEK ini dinyatakan termasuk dalam intervensi spesifik prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak langsung pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Pemberian vitamin dan pemantauan Kesehatan untuk sasaran balita stunting termasuk dalam intervensi spesifik pendukung, yaitu intervensi yang berdampak secara tidak langsung pada pencegahan stunting melalui mekanisme perbaikan gizi dan kesehatan, yang dilakukan setelah intervensi prioritas terpenuhi.

o Analisis Implementasi Kebijakan

Standar dan Tujuan

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan melalui standar dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai arahan atau pedoman dalam terlaksananya suatu program, sesuai dengan teori Van Meter dan van Horn, penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan program CSR terhadap penurunan stunting, yaitu implementasi kebijakan program CSR dalam penanganan kejadian stunting di Kabupaten Balangan (Van Meter DS, 1975).

Berdasarkan dari hasil wawancara dan telusur dokumen yang dilakukan maka diperoleh para informan dapat menjelaskan dasar pedoman atau regulasi yang mengatur terkait program stunting stunting. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo dkk, diperoleh keterangan bahwa para pelaksana khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut (Sunaryo et al., 2022).

Pedoman stunting Kabupaten Balangan telah berjalan optimal karena sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 yang kemudian diturun dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pencegahan Stunting. Melalui regulasi daerah ini dapat mendorong upaya pencegahan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, disamping itu juga untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting dan menghasilkan generasi sehat dan cerdas.

Upaya penanggulangan stunting yang telah dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia selaras dengan pilar Adaro Nyalakan Perubahan, yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan Term Sheet Kegiatan PT. Adaro Indonesia Nomor: 003/ TSK/ AI-CSR/ II/ 2023 tentang Program Percepatan Penurunan Stunting (PP Stunting) Kabupaten Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Barito Selatan dan Barito Timur Tahun 2023, didalam dokumen ini memuat rinci program stunting yang akan dilaksanakan termasuk target yang akan dicapai. Dokumen TSK ini sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan. Berdasarkan hasil telusur dokumen tersebut menyebutkan bahwa target stunting yang ingin dicapai sebesar 14% di tahun 2024. Hal ini seperti yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Tahun 2023, tidak ada perbedaan target stunting dari beberapa dokumen tersebut.

Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, seperti tujuan yang tercantun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Tujuan tersebut kemudian selaras dengan regulasi daerah Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022.

Tujuan CSR PT. Adaro Indonesia dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Balangan sangat diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Adaro:
 - a. Melaksanakan kewajiban program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - b. Mitigasi potensi konflik di desa-desa ring 1 wilayah operasional perusahaan.
 - c. Menjadi inspirator dan kolaborator dengan Pemda setempat di sektor kesehatan, khususnya membantu pencegahan stunting.
 - d. Mendukung Program Nasional Penanganan stunting
2. Untuk Pemerintah:
 - a. Mendukung dan sinergi pembangunan kesehatan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
 - b. Mendukung peningkatan indikator Indeks Harapan Hidup (IHH) dan indeks daya beli masyarakat melalui program pencegahan stunting.
 - c. Mendukung tercapainya universal acces tahun 2030 untuk penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024
3. Untuk Masyarakat:
 - a. Harmonisnya hubungan masyarakat desa ring 1 dengan perusahaan.
 - b. Mendukung peningkatan kesehatan masyarakat desa ring 1.
 - c. Memperkuat kehidupan dan kesehatan sosial masyarakat desa ring 1 melalui program pencegahan stunting.

Hasil pelaksanaan kegiatan ini akan dituangkan dalam laporan kegiatan yang akan

dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pelaporan kegiatan stunting dalam lingkup kolaborasi antara PT. Adaro Indonesia dengan pemerintah daerah kabupaten Balangan secara berjenjang. Bentuk laporan stunting berupa cetak dengan alur pelaporan data stunting per desa yang di input oleh kader stunting yang kemudian dirakapitulasi dan diteruskan kepada fasilitator kecamatan, dimana fasilitator kecamatan melakukan rekapitulasi data per kecamatan dan melaporkan data stunting tersebut kepada fasilitator kabupaten. Kemudian laporan tingkat kabupaten tersebut di olah menjadi data cakupan kabupaten oleh YABN dan di laporkan kepada CSR. Pelaporan kegiatan ini akan di laporkan kepada stakeholders terkait. Hal ini sesuai dengan Capaian dan Indikator (Pilar 5) dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2024 yang berbunyi “pelaksanaan dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala”.

Untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi dasara implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan apakah pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Karakteristik Organisasi

Bedasarkan hasil wawancara dengan para informan dan telusur dokumen yang telah di lakukan dapat dikatakan bahwa PT. Adaro Indonesia perlu menjaga citra perusahaan maupun kelangsungan operasi yang efisien, sehingga perlu menjalin hubungan dengan pemerintah daerah guna menciptakan pembangunan daerah yang berdampak pada masyarakat sekitar. Dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan maka stunting menjadi hal yang sangat penting. PT. Adaro Indonesia selaku perusahaan yang memiliki wilayah operasional di Kabupaten Balangan memiliki tanggung jawab sosial bagi lingkungan sekitarnya tersebut. Hal ini selaras dengan risiko hubungan masyarakat yang ada pada Annual Report 2023 PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Dimana ada dua Tindakan mitigasi yang mestinya dilakukan, yaitu:

1. Pendekatan strategis melalui keterlibatan proaktif dalam kondisi kehidupan masyarakat, serta inisiatif dan evaluasi secara berkelanjutan.
2. Berkontribusi positif kepada masyarakat melalui komunikasi yang solid, kemitraan, dan program CSR yang bermanfaat, yang sejalan dengan praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

PT. Adaro Indonesia dapat berperan signifikan dalam upaya penanganan stunting, membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Dapat dikatakan bahwa rantai publik-swasta dibina baik ketika pemerintah dan lembaga antar pemerintah berinteraksi dengan sektor swasta nirlaba untuk memanfaatkan sumber daya, atau organisasi nirlaba. swasta untuk keahlian teknis.

Perwujudan tanggung jawab sosial, menurut Davindra yang di kutip dari Iswiyati Rahayu dalam penelitiannya Implementasi Program CSR dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat, seluruh kegiatan CSR tidak berorientasi pada pada hasil semata, tetapi lebih ditekankan terhadap pemberdayaan komunitas masyarakat lokal. Selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Iswiyati Rahayu tersebut menyebutkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang.

Aturan kebijakan dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dengan PT. Adaro Indonesia tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP). Regulasi ini memuat mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, maksud dan tujuan, serta hak dan kewajiban perusahaan, program dan bidang kerja, tim kerja, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program, pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, sanksi administrasi, dan penutup. Regulasi ini juga menjadi landasan pedoman kerjasama pemerintah daerah dengan pihak perusahaan, memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah dengan lebih efektif bagi semua pihak.

Dalam Stranas Percepatan Pencegahan Stunting Periode 2018-2014 menjelaskan bahwa dalam pencegahan stunting menyasar berbagai penyebab langsung dan tidak langsung yang memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintah, swasta dan dunia usaha serta masyarakat. Dalam Rencana Stunting yang dilakukan oleh daerah juga diperlukan mengadvokasi pemimpin daerah, swasta, dan masyarakat madani untuk mendukung. Keterlibatan dunia usaha, universitas/akademisi, organisasi profesi, media, dan organisasi/kelompok masyarakat lainnya, dengan memobilisasi sumber daya dan mendorong partisipasi secara aktif dalam percepatan pencegahan stunting di kalangan masyarakat. percepatan pencegahan stunting. Sehingga jelas bahwa kolaborasi antara PT. Adaro Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Balangan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Dalam mensukseskan kebijakan maka sangat membutuhkan koordinasi lintas sektoral guna keberhasilan pencapaian tujuan bersama (Syamsuadi et al., 2023). Kolaborasi adalah tindakan joint-working yang melibatkan berbagai aktor, individu, grup, atau organisasi yang bersama-sama berusaha mewujudkan tujuan tertentu. Kolaborasi merupakan serangkaian komponen-komponen yang berjalan membentuk suatu siklus, mempengaruhi satu sama lain, dan pada intinya adalah proses collective decision-making. Sebuah kolaborasi berhasil dilakukan tidak lepas dengan peran para stakeholder atau aktor di dalamnya. Pentahelix merupakan

konsep yang berkembang dari triple helix dan quadruple helix (Rozikin, 2019).

Kolaborasi antar pemerintah daerah Kabupaten Balangan dan PT. Adaro Indonesia selama ini berjalan dengan harmonis, terkhusus keterlibatan CSR dalam upaya penanggulangan stunting ini. Segala bentuk kolaborasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan dan CSR PT. Adaro Indonesia tertuang dalam SK Bupati Balangan tentang Program dan Budget CSR setiap tahunnya sejak tahun 2010 hingga sekarang. Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Balangan dalam penanggulangan stunting ini melalui terbitnya Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 505/ Kum Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Balangan dan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/ 317/ Kum Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting. Selama ini CSR selalu dilibatkan sebagai anggota dalam Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) dan Tim Balancing. Melalui kolaborasi ini maka termasuk di dalamnya proses pengawasan (monitoring dan evaluasi)

Kabupaten Balangan merupakan wilayah dengan jumlah sasaran terbanyak untuk program Percepatan Penurunan Stunting (PP Stunting) dalam program CSR PT. Adaro Indonesia. Tarik menarik kepentingan dalam upaya penanggulangan stunting ini lebih kepada penentuan sasaran stunting di Kabupaten Balangan, pembahasan penentuan desa sasaran dilakukan dalam diskusi bersama dan menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Desa sasaran dalam program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan tahun 2023 sebanyak 19 desa, dan pada tahun 2024 ada penambahan desa sasaran baru sebanyak 21 desa sehingga total desasasaran di tahun 2024 sebanyak 40 desa sasaran stunting.

Pelaksanaan percepatan penurunan stunting PT. Adaro Indonesia ini secara teknis dilaksanakan oleh anak perusahaan PT. Adaro Energi Tbk yaitu Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) yang merupakan anak perusahaan bersifat nirlaba. YABN sendiri bertindak sebagai pelaksana teknis dalam intervensi spesifik dan sensitif untuk kegiatan yang bersifat tanggung jawab sosial dari perusahaan. PT Adaro Indonesia dalam hal ini sebagai pemilik program dan anggaran yang kemudian sebagai pelaksana teknis di lapangan dilakukan oleh YABN.

Yayasan Adaro Bangun Negeri didirikan pada tahun 2009 sebagai pusat nirlaba yang menjalankan berbagai program CSR Grup Adaro untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi dan yang lebih besar. Yayasan ini juga mewakili komitmen perusahaan terhadap aspek ESG dengan visi untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, cerdas dan mandiri dalam lingkungan yang lestari. Adaro berharap agar program-program CSR YABN dapat membawa perubahan positif untuk meningkatkan masyarakat di lima aspek utama kehidupan: ekonomi, edukasi, kesehatan, sosial budaya, dan lingkungan. Maka dari itu, program utamanya bernama Adaro Nyalakan Perubahan, yang mengupayakan perbaikan di lima aspek yang ditargetkan dengan slogan berikut:

1. Pendidikan: Adaro Nyalakan Ilmu

2. Ekonomi: Adaro Nyalakan Sejahtera
3. Kesehatan: Adaro Nyalakan Raga
4. Sosial budaya: Adaro Nyalakan Budaya
5. Lingkungan: Adaro Nyalakan Lestari

YABN akan terus melayani Grup Adaro sebagai pusat keunggulan CSR, demi membuahkan hasil yang lebih berdampak dan memperbaiki standar kehidupan di wilayah tempatnya beroperasi. YABN bekerja sama dengan PT. Medha Parahita Indonesia dalam melakukan upaya kontribusi untuk penurunan angka penderita stunting di 6 kabupaten wilayah operasional perusahaan. Adapun jumlah desa ring 1 operasional PT Adaro Indonesia yang akan menjadi sasaran intervensi di Kabupaten Balangan akan menyasar 21 desa baru dan 19 Desa Intervensi Lanjutan 2022. Dan ini merupakan jumlah desa terbanyak yang mendapatkan bantuan percepatan penurunan stunting PT. Adaro Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat ini daerah operasional pertambangan sekitar 80% berada di wilayah Kabupaten Balangan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Medha Parahita Indonesia dalam bentuk pelatihan kader stunting dan fasilitator kecamatan.

SOP menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus jelas, fasilitas harus memadai dan SOP sebagai pedoman harus memiliki kejelasan yang dapat dimengerti oleh sasaran sehingga implementasi dari suatu kebijakan akan berhasil. SOP memainkan peran krusial dalam program penanganan stunting, karena memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi setiap tahapan pelaksanaan program. Dengan SOP, konsistensi dan kualitas layanan dapat dijaga sehingga setiap intervensi yang diberikan memiliki dampak optimal. SOP juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi kebingungan dan menghindari duplikasi pekerjaan, serta memfasilitasi pelaksanaan program agar berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, SOP mempermudah evaluasi dan monitoring, memungkinkan pengendalian risiko yang lebih baik, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya SOP, transparansi dan akuntabilitas program meningkat, menjadikan setiap langkah dalam pelaksanaan program dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sehingga tujuan pengurangan angka stunting dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian Yudianta et al, menjelaskan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan atau program kesehatan tentunya harus mempunyai pedoman seperti SOP, juklak, juknis bagaimana program tersebut akan dilaksanakan dan apa tujuan serta sasarannya. Untuk mencapai tujuan dari suatu program tersebut tentunya program itu harus disosialisasi kepada petugas kesehatan yang nantinya informasi tersebut bisa dimengerti dan dapat diterima oleh sasaran/masyarakat, dengan begitu semua program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

Menurut Tataghati dalam (A. A. Grde Ajasta, 2018) menyatakan bahwa SOP dapat didefinisikan sebagai dokumen yang menjabarkan aktivitas operasional yang dilakukan sehari-hari, dengan tujuan agar pekerjaan tersebut secara benar, tepat

dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang telah ditetapkan .

Tidak ditemukannya SOP dalam program percepatan penurunan stunting ini maka akan mengakibatkan berbagai dampak negatif yang signifikan. Tanpa SOP, pelaksana program mungkin mengalami kebingungan terkait tugas dan tanggung jawab, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian kerja. Hal ini dapat menghasilkan inkonsistensi dalam kualitas layanan yang diterima oleh anak-anak dan keluarga, serta menurunkan efisiensi operasional karena proses kerja yang tidak terstruktur. Evaluasi dan monitoring juga menjadi sulit dilakukan, menghambat identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Risiko kesalahan dalam pelaksanaan program meningkat, dan program berisiko tidak mematuhi regulasi yang berlaku, yang dapat mengakibatkan masalah hukum dan menurunkan kredibilitas. Kurangnya SOP juga mengurangi transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Akibatnya, pencapaian tujuan utama untuk mengurangi angka stunting di masyarakat dapat terhambat.

Sinta Nuramalia, dkk dalam penelitiannya juga menyebutkan kurang fokusnya kader kesehatan desa dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa sehingga terkadang kurang memahami SOP dalam pelaksanaan pekerjaannya, hal ini akan menghambat dalam melaksanakannya di lapangan. Maka perlu melakukan komunikasi dan pendekatan terhadap para kader kesehatan di desa untuk selalu aktif untuk memahami SOP dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat mempermudah untuk melaksanakannya di lapangan

Sehingga dalam melaksanakan kebijakan program perlu di dukung dengan SOP dan standar kerja yang jelas agar dapat mempermudah dan dapat meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu perlu adanya tanggung jawab moral dari para pelaksana dilapangan agar dapat optimal dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan.

Berdasarkan Buku Petunjuk Teknis - Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Kota oleh Bappenas Idealnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di Posyandu dilakukan rutin setiap satu bulan sekali oleh tenaga kesehatan dibantu oleh kader Posyandu dan KPM. Namun untuk pengukuran panjang badan bayi dan Baduta (0-23 bulan) atau tinggi badan Balita (24-59 bulan) dapat dilakukan minimal tiga bulan sekali sesuai ketentuan yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 66 tahun 2014. Pemantauan perkembangan dilakukan setiap tiga bulan pada anak usia 0-24 bulan dan setiap enam bulan pada anak usia 24-72 bulan. Pengukuran stunting dilakukan dengan mengukur panjang badan untuk anak di bawah dua tahun dan tinggi badan untuk anak berusia dua tahun ke atas dengan menggunakan alat antropometri yang tersedia di Puskesmas (length board and microtoise). Diharapkan dalam kurun waktu tiga bulan, seluruh anak balita di desa sudah dapat diukur status gizinya.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber-sumber daya yang dimaksud di sini sebagai pendorong atau penggerak jalannya suatu kebijakan. Sehingga ketersediaan sumber daya tidak dapat disepelekan. Sumber daya memainkan peran vital dalam implementasi kebijakan program stunting, karena tanpa alokasi yang memadai dan pengelolaan yang tepat, program ini sulit mencapai tujuannya.

Sumber daya yang diperlukan mencakup pendanaan yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan, tenaga kerja yang terlatih dan kompeten, serta fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan intervensi. Kurangnya sumber daya dapat menghambat pelaksanaan program, mengurangi kualitas layanan, dan menurunkan motivasi para pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk menyediakan dan mengelola sumber daya dengan baik sangat diperlukan agar program stunting dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang nyata dalam upaya mengurangi prevalensi stunting di masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen kunci dalam implementasi kebijakan program stunting, karena kualitas dan kompetensi tenaga kerja sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Menurut Van Meter dan Van Horn Keberhasilansuatu implementasi kebijakan sangat bergantungpada kemampuan dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia baik secara kuantitas maupunkualitasnya. SDM yang terlatih dan berpengalaman mampu menjalankan intervensi dengan tepat, memberikan penyuluhan yang efektif, serta melakukan pemantauan dan evaluasi program secara akurat. Keberhasilan program juga bergantung pada koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, petugas lapangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, motivasi dan dedikasi SDM sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan komitmen terhadap tujuan program. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan, pengembangan kapasitas, dan kesejahteraan SDM harus menjadi prioritas utama. Dengan SDM yang kompeten dan termotivasi, program stunting dapat diimplementasikan secara lebih efisien dan efektif, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya penurunan prevalensi stunting dan peningkatan kualitas hidup anak-anak di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan telusur dokumen yang telah dilakukan makan ada keterlibatan kader stunting, fasilitator kecamatan dan faasilitator kabupaten selama ini cukup membantu dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Dimana kader stunting ini merupakan kader aktif di desa cukup membantu dalam pelaksanaan program ini, sebagai salah satu bentuk pendekatan intens terhadap sasaran. Fasilitator yang dilibatkan juga merupakan masyarakat yang selama ini berperan aktif dalam setiap kegiatan yang ada di desa. Selama ini kader stunting yang menjalannya program ini telah mengikuti 2 kali pelatihan, petihan dilakukan setiap tahun di mulai sejak program PP Stutnign ini ada

pada tahun 2022. Sehingga dengan informasi yang disampaikan secara konsisten tidak menimbulkan kebingungan bagi kader dan terlebih pada sasaran stunting yang berhubungan erat dengan kader dalam proses pendampingan dan pemantauan.

Kader kesehatan dan fasilitator kecamatan terlebih dahulu mendapatkan pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Program Percepatan Penurunan Stunting agar meningkatkan kemampuannya pada saat di desa. Didalam pelatihan ini mereka dibekali keterampilan baik dari kemampuan pengenalan masalah, kemampuan komunikasi yang baik dalam pendekatan dengan sasaran stunting, cara pengukuran yang benar menggunakan antropometri serta cara input data balita ke dalam format excel yang telah disediakan. Sedangkan fasilitator kecamatan diberikan pembekalan tentang cara pengenalan masalah dan solusi penyelesaiannya serai rekapitalasi laporan dari setiap desa. Untuk fasilitator kabupaten merupakan staf pelaksana di dalam YABN, yang berperan dalam koordinasi data serta kegiatan yang ada di kabupaten.

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan atura-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. selain itu keterbatasan sumber daya yang ada dalam melaksanakan pencegahan stunting di desa karena kurang didukung dengan sejumlah kompetensi petugas pelaksana dan pemahaman terhadap mekanisme yang kurang sehingga petugas kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya seperti yang dijelaskan Sinta Nuramalia, dkk dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis.

Dalam menyelesaikan permasalahan SDM yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan tidaklah cukup dengan hanya penambahan SDM saja, namun diperlukannya penambahan SDM dengan kemampuan yang kompeten pada bidang yang ditentukan (Purlihaningsih et al, 2017). Hal ini diperkuat dengan Nabila dan Dini dalam penelitiannya menyatakan selain kuantitas yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia adalah kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan.

Sumber daya anggaran merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan program stunting, karena keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan dana yang memadai. Anggaran yang cukup memungkinkan pelaksanaan berbagai intervensi penting, seperti penyediaan makanan bergizi, layanan kesehatan, pendidikan bagi masyarakat, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pelaksana program. Tanpa anggaran yang mencukupi, program mungkin menghadapi kendala dalam menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menjangkau seluruh kelompok sasaran dengan

efektif. Didukung dengan Aria Jaya, dkk mengatakan dalam penelitiannya bahwa sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Selain itu, anggaran yang dikelola dengan baik memastikan bahwa setiap pengeluaran dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran, menghindari pemborosan dan memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara luas. Oleh karena itu, komitmen dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyediakan dan mengelola anggaran dengan transparan dan akuntabel sangat penting agar program stunting dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya untuk mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masyarakat.

Perencanaan anggaran sangat penting untuk dilakukan akan suatu program dapat berjalan sesuai dengan prosesnya, untuk program percepatan penurunan stunting ini perencanaan anggaran selalu dilakukan pada akhir tahun untuk pelaksanaan program di tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan referensi dokumen dalam TSK program percepatan penurunan stunting yaitu eretujuan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Adaro Indonesia Tahun 2023 Nomor: T-1388.RKAB/MB.05/DJB.B/2022 dari Kementerian ESDM, pada tanggal 30 Desember 2022. Hal ini sesuai dengan lampiran teknis atau mekanis pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Maret di tahun berikutnya.

Sejauh ini anggaran yang di alokasikan dalam program percepatan penurunan stunting dirasa cukup oleh beberapa pihak, dari data yang diperoleh anggaran yang dialokasikan dapat terealisasi penuh atau 100%.

Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah pilar utama dalam implementasi kebijakan program stunting, karena memastikan bahwa informasi yang tepat dapat tersampaikan kepada semua pemangku kepentingan secara akurat dan tepat waktu. Komunikasi yang baik antara stakeholder dapat meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan pemahaman bersama mengenai tujuan dan strategi program. Ini termasuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya gizi yang baik, pola makan sehat, serta praktik kebersihan yang mendukung pencegahan stunting.

Melalui komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya (SAMPOH et al., 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi

sudah dilakukan oleh para pelaksana. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan program percepatan penurunan stunting ini dilaksanakan melalui rapat-rapat rutin serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Selain pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara formal, pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam proses implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi juga dilakukan secara informal melalui grup media sosial.

Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi). Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-levelbureaucrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua), selain itu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Selain itu, komunikasi yang transparan dan terbuka juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program. Dengan adanya saluran komunikasi yang efektif, feedback dari lapangan dapat direspons secara cepat dan tepat, sehingga memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih dinamis dan adaptif. Pada akhirnya, komunikasi yang kuat dan terstruktur mendukung keberhasilan program stunting dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak di masyarakat.

Selama ini informasi terkait program percepatan penurunan stunting ini disampaikan pada media komunikasi formal dan informal. Media formal berupa pertemuan rapat-rapat berkala yang dalam pembahasan progres program. Sedangkan media nonformal lainnya melalui grup-grup media sosial yang ada yang terdiri dari berbagai stakeholder terkait.

Informasi yang diberikan cukup jelas mengenai bentuk kegiatan atau intervensi spesifik dan sensitive dal program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan. Sesuai dengan dokumen TSK program percepatan penurunan stunting PT. Adaro Indonesia dengan waktu, tempat & penerima manfaat pelaksanaan kegiatan dilakukan pada Maret – Desember 2023 di wilayah operasional perusahaan Kabupaten Balangan. Penerima manfaatnya adalah Baduta (Bayi di bawah dua tahun) Stunting, Ibu Menyusui yang memiliki Baduta Stunting, Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK). Bentuk intervensi spesifik diantaranya pemberian PMT berupa telur dan susu untuk sasaran balita stunting dan PMT susu untuk ibu hamil KEK selama 6 bulan, pemberian bibit sayur dan polibek agar ditanam di pekarangan rumah, pemeriksaan. Sedangkan bentuk intervensi sensitifnya berupa pelatihan bagi kader stunting dan fasilitator kecamatan, bantuan pembangunan sarana sanitasi (jamban sehat) untuk mencapai desa ODF, pendampingan kepesertaan BPJS.

Disyaratkan memenuhi energi, protein, dan lemak dalam jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis PMT Berbahan Pangan Lokal untuk balita dan ibu hamil. Tdak pernah disebut jenis atau merek tertentu, yang jelas boleh

dari makanan lokal dan boleh dari jenis makanan pabrik. PMT lokal pada Ibu hamil KEK dilakukan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari agar dapat memberikan efek positif terhadap bayi yang dilahirkan. PMT lokal pada Balita Gizi Kurang dilakukan selama 4 – 8 minggu untuk mencapai perbaikan status gizi.

Kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dapat ditempuh dengan koordinasi dan komunikasi para pelaksana kebijakan di dalam dan antara organisasiorganisasi lainnya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin jelas informasi yang diberikan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan. Selain itu koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus selalu dilakukan. Menurut Diana Rosa, dkk dalam penelitiannya mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan. Selain itu koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan harus selalu dilakukan. Didukung dengan Maulida dan Suriani dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu bentuk intensif yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan adalah diadakannya pelatihan yang konsisten untuk para kader sebagai upaya dalam menambah wawasan agar lebih optimalnya pelayanan posyandu.

Selama ini informasi yang tersampaikan cukup konsisten terkait progress program percepatan penurunan stunting dan pembahasan mengenai penyandingan data yang berbeda dikarenakan basedata antara yang dimiliki oleh CSR dan data Dinas Kesehatan, sehingga data hasil akhir ataupun output cakupan stunting menjadi berbeda pula. Terkadang juga ditemui kendala lain seperti ketapatan waktu pertemuan yang tidak sinkron atau saling selisi antar stakeholder terkait.

Namun ditemukan permasalahan bahwan informasi program percepatan penurunan stunting ini kurang diketahui oleh petugas gizi puskesmas. Petugas gizi cenderung mengetahui informasi terkait program ini melalui kader ataupun saat rapat pembahsan petugas gizi tingkat kabupaten di Dinas Kesehatan. Padahal petugas gizi puskesmas adalah ujung tombak ketersediaan data dasar untuk sasaran stunting di wilayah kerja puskesmas. Petugas gizi sebagai pelaksana program gizi di wilayah kerjanya pada kecamatan masing-masing, disamping itu petugas gizi juga melakukan pemantauan berjalannya program.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan program stunting, karena sikap yang proaktif, empatik, dan berkomitmen tinggi dapat mendorong keberhasilan

program. Pelaksana yang memiliki sikap positif cenderung lebih termotivasi untuk memberikan layanan terbaik, melakukan penyuluhan dengan penuh kesabaran, serta membangun hubungan baik dengan masyarakat. Sikap empatik membantu pelaksana memahami kondisi dan kebutuhan individu serta keluarga yang terpengaruh stunting, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, sikap proaktif dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta berinovasi dalam pendekatan, sangat penting untuk menangani tantangan yang muncul di lapangan. Dengan pelaksana yang berdedikasi dan berkomitmen tinggi, program stunting dapat dijalankan dengan lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan untuk menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dapat tercapai secara optimal.

Keberhasilan implementasi kebijakan jugadipengaruhi oleh sikap penerimaan ataupun penolakan dari para pelaksana kebijakan. Sikap parapelaksana dapat meliputi pemahaman terhadap isikebijakan, tujuan kebijakan, sikap arah responmenerima, netral atau menolak atas kebijakan, danintesitas sikap.

Pengetahuan yang mendalam tentang target, penyebab, dampak, dan strategi penanganan stunting membantu pelaksana program merancang intervensi yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Pemahaman yang baik mengenai konteks lokal, termasuk kebiasaan, kebutuhan, dan tantangan spesifik masyarakat, memungkinkan penyesuaian strategi agar lebih relevan dan diterima oleh target audiens. Selain itu, pendalaman yang terus menerus terhadap perkembangan terbaru dalam ilmu gizi, metodologi intervensi, dan evaluasi program memastikan bahwa kebijakan tetap efektif dan responsif terhadap perubahan situasi. Dengan pengetahuan yang solid, pemahaman yang komprehensif, dan pendalaman yang konsisten, program stunting dapat diimplementasikan secara lebih efisien, memastikan bahwa semua langkah yang diambil berkontribusi secara optimal dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan anak-anak.

Sebagian infroman mengetahui pengertian atau definisi stunting dan mengapa stunting ini menjadi program prioritas serta besaran target yang ingin dicapai. Rata-rata dari mereka dapat menjelaskan bahaya stunting yang dapat mempengaruhi perkembangan otak anak sehingga berdampak pada perkembangan SDM yang akan terhambat. Kader stunting paham betul pentingnya stunting, dimana mereka melakukan pendampingan dan pemantauan yang merupakan salah satu bentuk intervensi stunting. Apa bila terdapat kendala kader dapat langsung mencari alternatif solusi terkait pola asuh yang kurang tepat dimasyarakat. Namun kader kurang mengetahui besaran target yang ingin dicapai melalui program ini.

Sikap Pelaksana dikatakan baik jika pelaksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana (Ani dan Sulistio, 2017). Ketika pelaksana program dapat memahami

dengan baik tugas mereka maka mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan benar.

Arah respon dalam implementasi kebijakan program stunting sangat menentukan efektivitas dan dampak dari intervensi yang dilakukan. Respon yang jelas dan terarah membantu memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Ketika menghadapi tantangan atau perubahan situasi di lapangan, arah respon yang baik memungkinkan adaptasi yang cepat dan tepat, sehingga program tetap relevan dan efektif. Dengan arah respon yang tepat, program stunting dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan beradaptasi dengan dinamika yang berubah, sehingga mencapai hasil yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi prevalensi stunting.

Keikutsertaan kader desa menjadi kader stunting telah ditetapkan dengan per desa sasaran sebanyak 2 orang kader stunting, namun untuk Desa Bata Kecamatan Juai mereka mengajukan usulan penambahan kader stunting 2 orang tambahan sehingga ada 4 orang akder stunting khusus Desa Bata. Hal ini dilakukan karena pihak desa merasa banyaknya sasaran balita stunting di desa mereka disbanding desa lainnya, sehingga diperlukan kader stunting yang lebih banyak agar program ini dapat berjalan optimal. Usul tersebut dapat di akomodir dengan baik oleh pihak YABN selaku pelaksana teknis dari program PP Stunting ini. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Sulistio (2017) bahwa sikap Pelaksana dikatakan baik jika pelaksana atau implementor sudah melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pelaksana.

Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter DS, 1975).

Intensitas dalam implementasi kebijakan program stunting sangat mempengaruhi keberhasilan dan dampak dari intervensi yang dilakukan. Tingkat intensitas yang tinggi dalam pelaksanaan program mencakup frekuensi dan durasi intervensi yang konsisten serta upaya yang berkelanjutan dalam setiap aspek program. Intensitas yang memadai memastikan bahwa setiap elemen program, mulai dari penyuluhan gizi hingga pemantauan kesehatan, dilakukan secara rutin dan menyeluruh, sehingga dapat mengatasi masalah stunting dengan lebih efektif. Sebaliknya, kurangnya intensitas dapat mengakibatkan dampak yang terbatas, pengabaian masalah yang belum terpecahkan, dan penurunan motivasi dari pelaksana dan peserta program. Hal ini didukung Nabila dan Dini dalam penelitiannya mengatakan sikap penerimaan atau penolakan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan juga menjadi hal yang penting dan perlu diperhatikan selain sub indikator-indikator lainnya dalam implementasi kebijakan.

Optimalisasi peran kader stunting agar menjadi contoh penggerak masyarakat. Dengan intensitas yang optimal, program stunting dapat mencapai hasil yang signifikan dan berkelanjutan dalam upaya mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Pihak PT. Adaro Indonesia sangat berharapnya kader yang sudah dilatih dan dilakukan pendampingan secara intensif akan mampu untuk menggerakkan dan memberdayakan masyarakat sekitar untuk mandiri melakukan pencegahan dan penanganan balita stunting. Kader stunting terbaik yang dapat di jadikan contoh atau pembentuk local heroes dari stunting. Sejalan dengan local heroes yang telah ada dalam penggerak ekonomi di masyarakat.

Sikap pelaksana yang mendukung dan merespon dengan baik kegiatan stunting ini secara konsisten setiap tahunnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan intervensi sesuai dengan tupoksi masing-masing stakeholder (Sunaryo et al., 2022). Namun tetap ada peningkatan pengetahuan mengenai pemahaman tentang program stunting ini melalui pertemuan intens tingkat kecamatan maupun kabuapten.

Oleh karena itu jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memainkan peran krusial dan saling terkait dalam implementasi kebijakan program stunting. Lingkungan sosial yang mendukung dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa program dijalankan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan local, masih ada orang tua dan lingkungan sekitar yang masih melakukan pola asuh yang salah dan merasa keberatan dengan status anaknya yang stunting. Dukungan aparat atau pemerintahan deasa juga sangat memengaruhi efektifitas program stunting ini. Dengan adanya dukungan dana desa berupa APBDes maka upaya penanggulangan stunting diharapkan dapat lebih cepat teratasi. Menurut Priyanto dan Noviana (2018) dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, dan sifat opini public.

Dari sisi ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, dan ketersediaan sumber daya sangat menentukan kemampuan keluarga untuk mengakses makanan bergizi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk mencegah stunting. Sebagian besar masyarakat sangat bersyukur mendapatkan bantuan stimulant berupa PMT karena dapat meringankan beban ekonomi mereka. PMT ini selain dari program

percepatan penurunan stunting namun sebagian desa di wilayah Kabupaten Balangan juga menganaggarkan PMT untuk seluruh balita di desa sebagai salah satu bentuk dukungan dana desa. Program stunting yang berhasil harus mampu mengatasi hambatan ekonomi dengan menyediakan bantuan yang sesuai, seperti bantuan pangan.

Secara politik, dukungan dan komitmen dari pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai, regulasi yang mendukung, dan koordinasi antar lembaga yang efektif. Stabilitas politik dan konsistensi dalam kebijakan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Oleh karena itu, keberhasilan program stunting sangat bergantung pada integrasi yang harmonis antara faktor sosial, ekonomi, dan politik, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

Menurut Priyanto dan Noviana (2018) dalam upaya mencapai keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi yang mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, kelompok kepentingan yang memberi dukungan, karakteristik para partisipan, dan sifat opini publik.

Lingkungan sosial memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan program stunting, karena faktor-faktor sosial dapat mempengaruhi efektivitas intervensi dan keberhasilan program secara keseluruhan. Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implemetasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo et al., 2022). Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan program percepatan penurunan stunting ini mendapat dukungan lingkungan sosial yang cukup baik, dimana semua desa mengirimkan kader desa nya untuk menjadi kader stunting dalam pelatihan peningkatan kapasitas kader. Disamping itu operasional posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya dengan anggaran operasional dari APBDes. Program stunting yang berhasil harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai dan kebiasaan lokal, serta melibatkan pemangku kepentingan di tingkat komunitas, seperti aparat desa dan kader kesehatan, untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif. Selain itu, memahami dinamika sosial seperti pola asuh, akses terhadap snitasi layak dapat membantu intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat.

Menurut Candradewi dalam penelitiannya dimana lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implemetasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial.

Lingkungan ekonomi memiliki dampak signifikan dalam implementasi kebijakan program stunting, karena faktor-faktor ekonomi dapat mempengaruhi akses, kualitas, dan keberhasilan intervensi yang dilakukan. Kondisi ekonomi masyarakat, termasuk tingkat pendapatan, pekerjaan,

berperan penting dalam menentukan sejauh mana keluarga dapat mengakses makanan bergizi dan layanan kesehatan yang dibutuhkan untuk mencegah stunting. Dalam lingkungan ekonomi yang kurang mendukung, tantangan seperti kekurangan dana, biaya hidup yang tinggi, dan rendahnya daya beli dapat membatasi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam keluarganya.

Hal ini sesuai dengan hasil temuan lapangan bahwa banyak keluarga sasaran stunting yang merasa sangat terbantu dengan PMT berupa susu dan telur, mereka mengatakan bahwa bantuan tersebut dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Sehingga beban pengeluaran dapat dialihkan untuk keperluan lainnya. Hal ini mendapat dukungan penuh dari desa dengan dana desa yang menganggarkan PMT posyandu yang semakin baik memenuhi unsur gizi seimbang dan bantuan PMT berupa susu untuk semua balita dan ibu hamil di desa. Walaupun masih ada desa yang belum menganggarkan bantuan tersebut untuk seluruh balitanya, hanya untuk balita dan ibu hamil dengan masalah gizi saja. Sangat disayangkan bahwa dukungan anggaran ini belum dapat diterapkan di lingkup kelurahan, dikarenakan kelurahan tidak memiliki anggaran khusus seperti APBDes. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khususnya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang ini yang menimbulkan kejadian stunting.

Lingkungan politik memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan program stunting, karena keputusan politik, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program. Dukungan politik yang kuat dan komitmen dari para pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai, regulasi yang mendukung, dan koordinasi antar lembaga yang efektif.

Kabupaten Balangan sangat optimal dalam mendukung program stunting, dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Percepatan Stunting, yang kemudian diiringi dengan SK Bupati Balangan tentang Tim Pokja Balancing dan SK Tim percepatan Penanganan Stunting serta diadakannya Himbauan Bagi Pemerintah Desa dalam penganggaran APBDes untuk pemberian susu bagi seluruh balita. Anggaran CSR pun di atur dalam sebuah regulasi daerah yaitu SK Bupati Balangan tentang Program dan Dana CSR, hal ini dilakukan agar upaya penurunan stunting di Balangan menjadi lebih optimal. Stunting telah menjadi program prioritas daerah karena berkaitan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan perlu di dukung dengan SDM yang lebih baik kedepannya.

Dalam lingkungan politik yang stabil dan mendukung, program stunting dapat berjalan dengan lebih lancar karena adanya konsistensi dalam kebijakan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Sebaliknya, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan yang sering, atau kurangnya dukungan politik dapat menghambat pelaksanaan program,

mengurangi alokasi sumber daya, dan menciptakan ketidakpastian yang mengganggu proses implementasi. Oleh karena itu, menciptakan dan memelihara dukungan politik yang kuat serta menjalin komunikasi yang baik dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya adalah kunci untuk memastikan keberhasilan program stunting dalam mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di masyarakat. Selaras dengan Wiguna dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa secara komprehensif tugas dan fungsi bupati dan wakil bupati sukabumi turut andil dalam penanggulangan stunting yang juga termasuk mendorong taraf hidup dan kesehatan masyarakat (Wiguna et al., 2022).

Kepentingan politik yang menopangi sebuah kebijakan akan memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan. Kepentingan tersebut dapat menjadi pendorong maupun penghambat dari keberhasilan implementasi kebijakan

SIMPULAN

Hasil penelitian terdiri dari; 1) Bentuk implementasi tercantum dalam Term Sheet Kegiatan; 2) Implementasi dari aspek standar dan tujuan sudah sesuai dan berjalan optimal; 3) Implementasi program dari aspek karakteristik organisasi masih ditemukan ketidak optimalan dalam menjalankan upaya percepatan penurunan stunting; 4) Implementasi program dari aspek sumber daya sudah sesuai dan berjalan optimal; 5) Implementasi program CSR PT. Adaro Indonesia dalam penurunan stunting di Kabupaten Balangan dari aspek komunikasi masih ditemukan kendala atau hambatan; 6) Implementasi program dari aspek sikap pelaksana telah sesuai dan berjalan optimal; 7) Implementasi program dari aspek lingkungan sosial, ekonomi dan politik telah sesuai dan berjalan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., Mutiasari, D., & Putra, R. A. (2020). *Peta Teori Ilmu Kesehatan Masyarakat ;Administrasi Kebijakan Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Mitra Wacana Media.
- Bappedalitbang Kabupaten Balangan. (2023). *Penanganan Stunting dan Kemiskinan di Kabupaten Balangan Materi Paparan ISSF Balangan*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. (2023). *Indikator Gizi dan KIA Tahun 2022 - 2024*.
- Herista, Putri, Setiawati, S. D. (2023). Implementasi CSR Program Health & Nutrition di Site Rantau. *Proceeding of Management*, 10(1), 454–460.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*.
- Makripuddin, L., Roswandi, D. A., & F. T. T. (2021). *Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia*. BKKBN.
- Nurva, L., & Maharani, C. (2023). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting: Studi Kasus di Kabupaten Brebes.

Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 12(02), 74–83.

Percepatan Penurunan Stunting, (2021).

Pramestuti, Nova., Iskandar, Slamet., Rubaya, Kharmayana, A. (2022). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Lia Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian*.

Rahayu, I. (2014). Implementasi Program CSR dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 13(1), 9–18. <http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/20082>

Rozikin, M. (2019). Kolaborasi Antar Stakeholders Penta Helix Dalam Pengembangan Kota Kreatif (Studi di Kota Malang). *PANGRIPTA: Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan*, 2(2), 49–57. <https://jurnalpangripta.malangkota.go.id/index.php/pangripta/index>

Sekretariat Wakil Presiden RI. (2019). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting)*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>

Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, Bunyamin, B., & Nursyamah. (2023). PERAN LINTAS SEKTOR DALAM KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN ROKAN HULU. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 6(1), 1–30.

Van Meter DS, V. H. C. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2022). Artikel-Penanggulangan Stunting Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 6(1), 28–37.